



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI

Dalam melakukan perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah mengidentifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena sangat berkaitan terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan lima tahun mendatang. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2019-2023, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini terkait fenomena yang menyebabkan perubahan RPJMD disusun, khususnya terkait merebaknya Pandemi Covid-19 yang masih menjadi prioritas dalam penanganannya.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar



pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara periode pembangunan 2019-2023 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan



masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan periode lalu penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas Utara adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat Padang Lawas Utara”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok yang dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Menurunnya perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan



kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas Utara:

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara



Permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar 4.1 diatas akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak

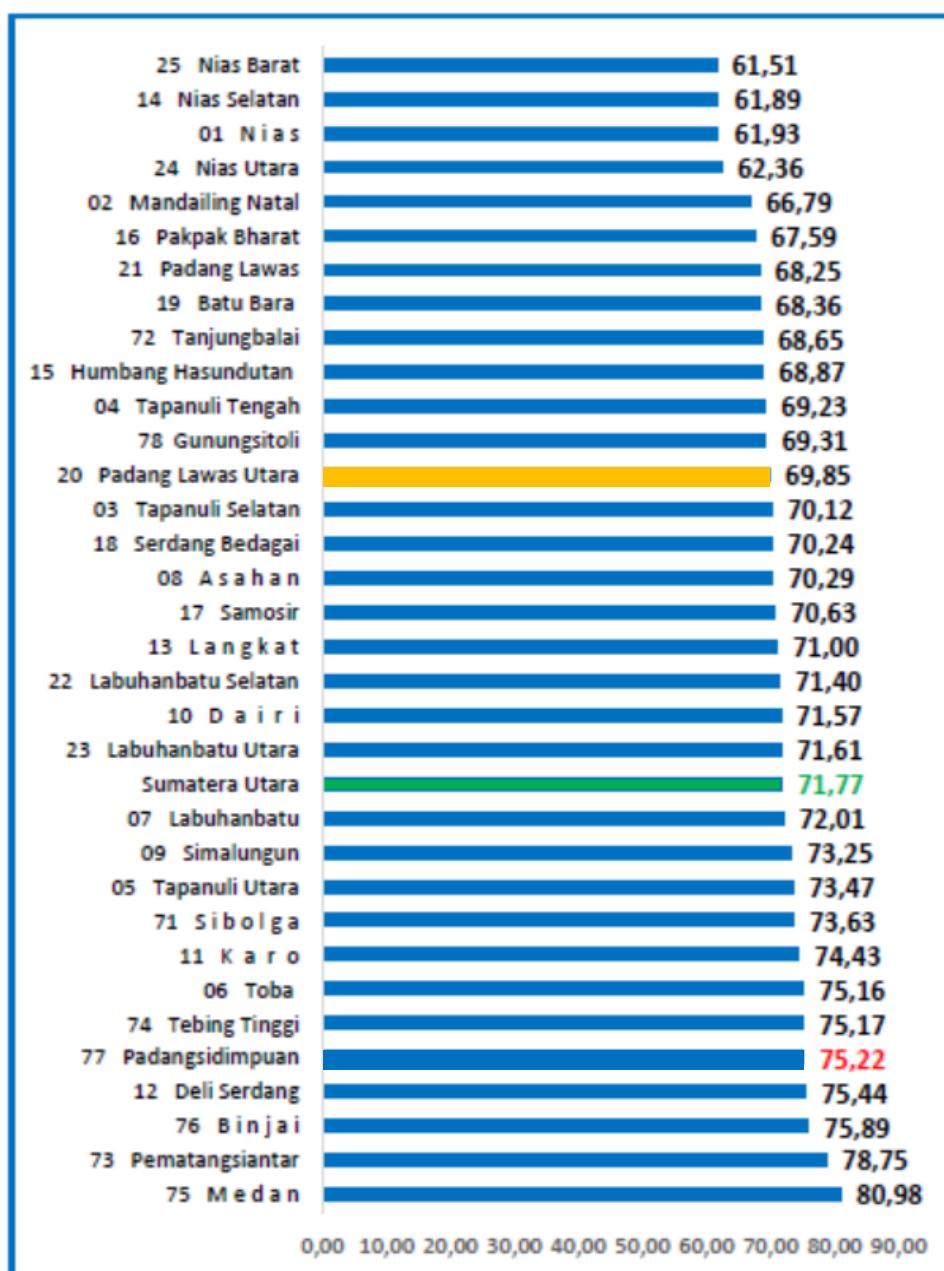


berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut.

Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka posisi IPM Kabupaten Padang Lawas Utara cukup rendah dengan posisi ke-21 dari 32 kabupaten/kota. Angka IPM ini tepat berada di bawah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki IPM sebesar 70,12.



Gambar 4.2
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:



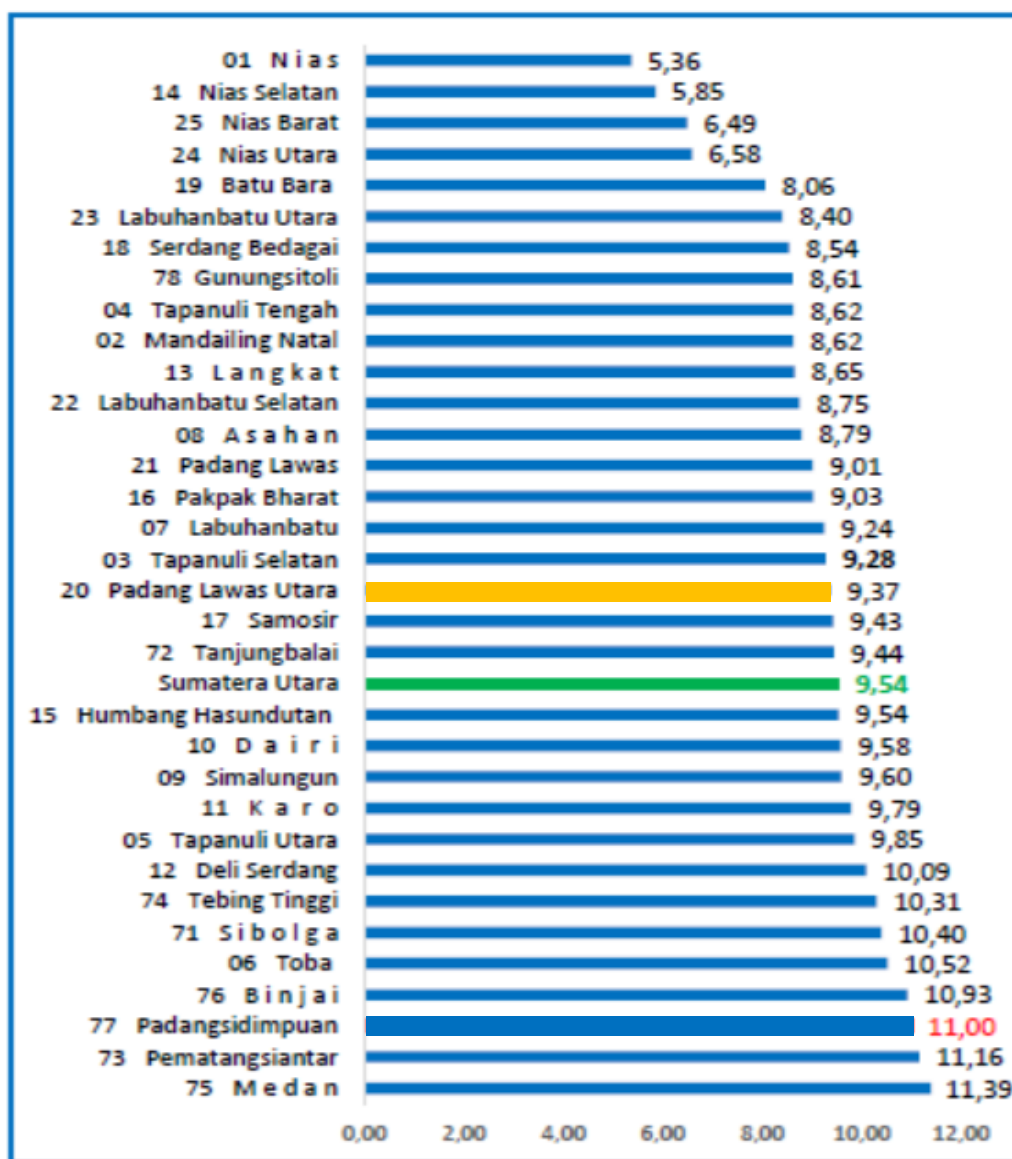
a. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Padang Lawas Utara kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



Gambar 4.3
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Indikator pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun meskipun begitu secara nilai masih tergolong cukup rendah. Hal ini terlihat pada perbandingan rata-rata lama sekolah se-Provinsi Sumatera Utara dimana rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mencapai 9,37 tahun 2020 berada pada posisi 16.



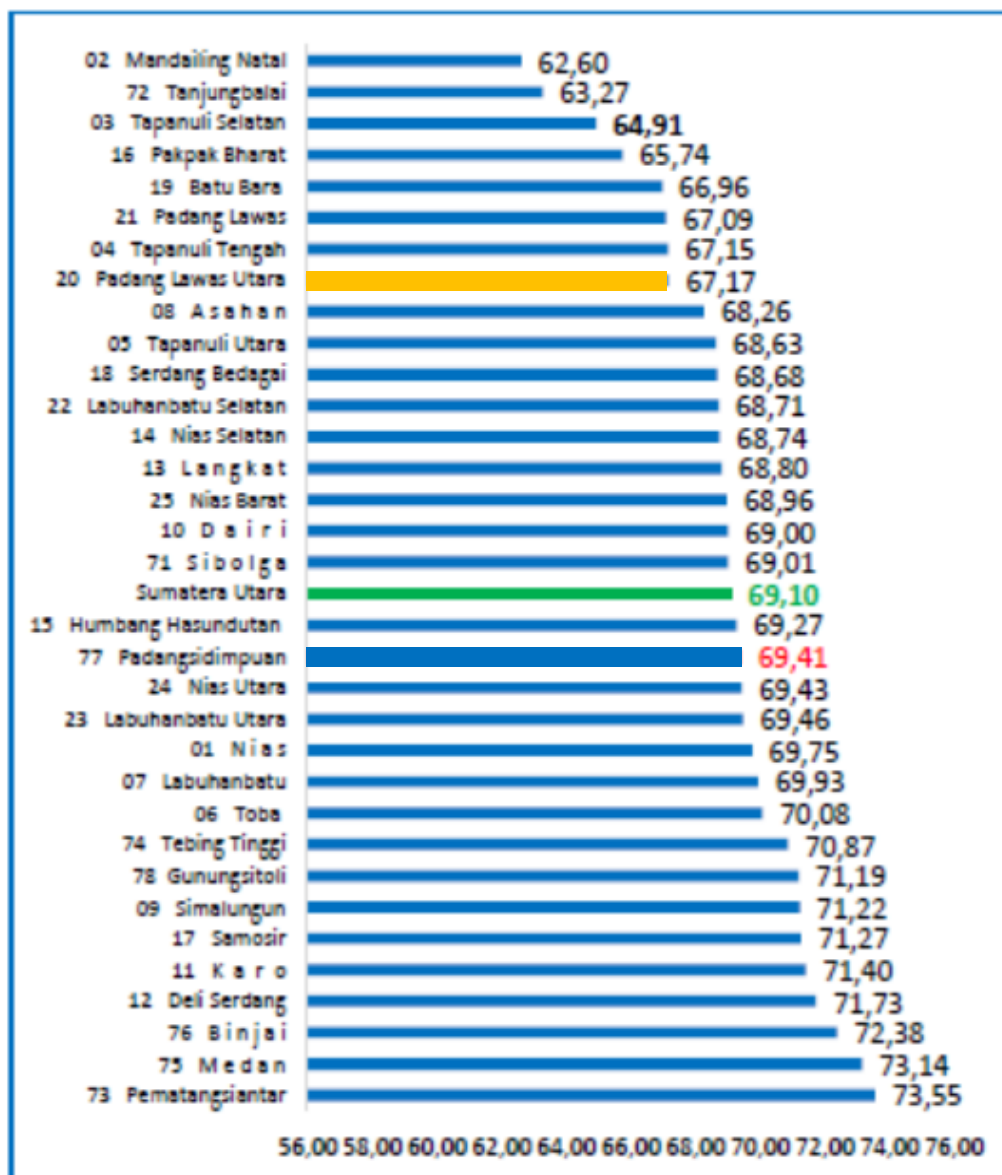
b. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Selain itu, keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu, pendistribusian tenaga medis belum merata pada seluruh lapisan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.



Gambar 4.4
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Padang Lawas Utara semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Namun meskipun secara *progress* mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun secara nilai absolut angka harapan hidup Kabupaten Padang Lawas Utara jauh



tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari posisi angka harapan hidup yang berada pada peringkat tujuh terendah di bawah Kabupaten Tapanuli Tengah.

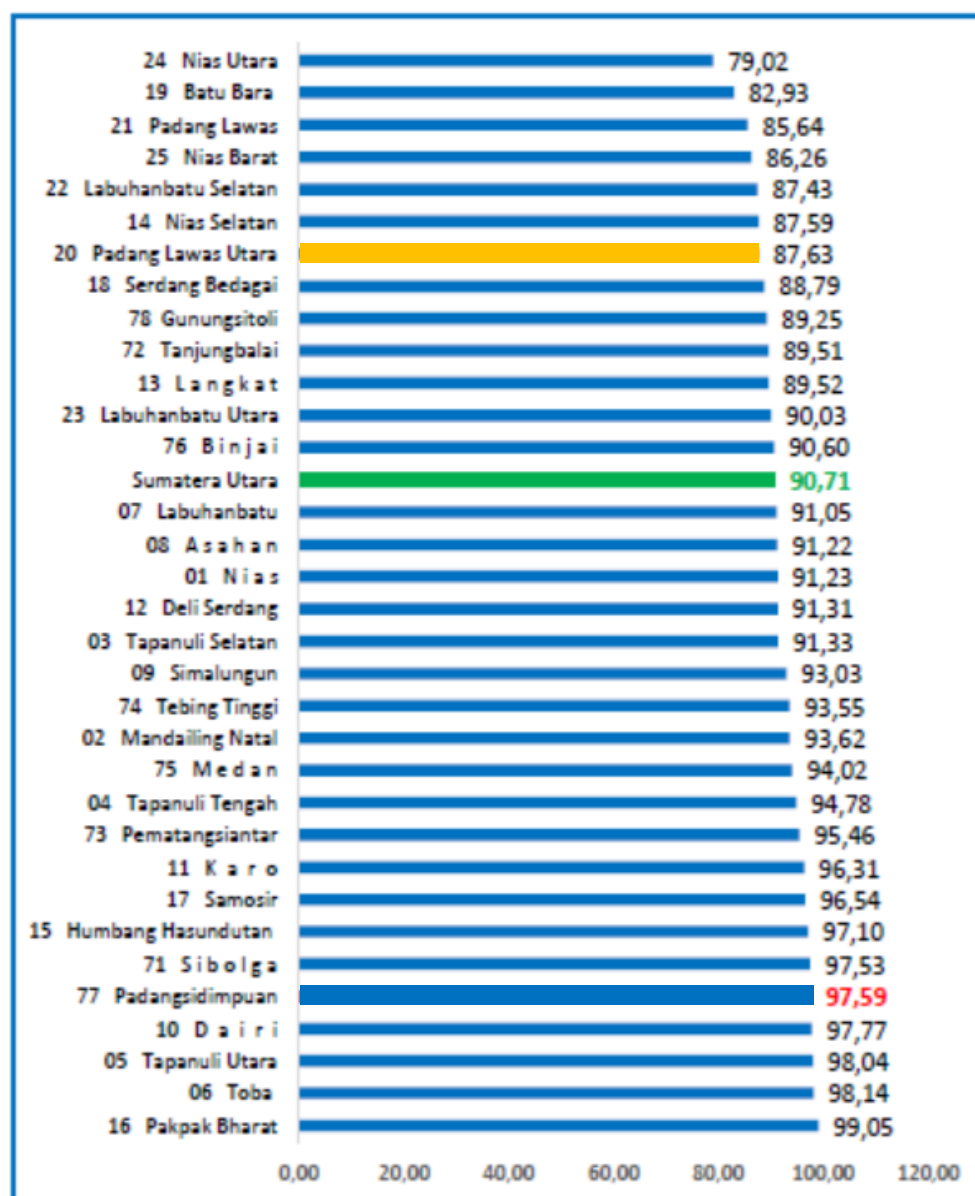
c. Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender

Perempuan dan anak sering menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Maka dari itu, perlu perhatian Pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu, pemberdayaan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang ada, prioritas penduduk pekerja Padang Lawas Utara adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya, terlihat *range* yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat serta perempuan di Padang Lawas Utara yang tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri.



Gambar 4.5
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kota Se- Sumatera Utara
Tahun 2020



Sumber: BPS RI, 2021

Terlihat pula bahwa angkatan kerja perempuan masih jauh dibawah jumlahnya jika dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 54.809 pekerja perempuan, sedangkan pekerja laki-laki mencapai 68.714 pekerja. Penyetaraan gender memang harus disesuaikan dengan budaya dan adat setempat dimana para perempuan sudah mulai berkeinginan untuk meningkatkan pengembangan dirinya agar menjadi lebih mandiri.



Dalam perihal adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, maka prioritas Pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahan serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional.

Secara umum, permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak, rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas yang memadai untuk mengajak dan memberdayakan perempuan agar lebih memiliki kegiatan produktif. Sehingga dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

d. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Pemuda merupakan tulang punggung masa depan bangsa Indonesia dimana partisipasinya dalam pembangunan diharapkan untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan di masa mendatang. Namun, secara kasat mata cukup terlihat minimnya peran serta pemuda baik dalam berorganisasi maupun dalam bidang lain seperti olahraga, ekonomi, maupun sosial sehingga pemuda Kabupaten Padang Lawas Utara belum signifikan dalam perwujudan tujuan pembangunan. Dengan berbagai penjabaran permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang memicu adanya permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.1.
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Terbatasnya pendidikan keterampilan berbasis keunggulan lokal
		2	Masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan
		3	Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan
		4	Masih belum meratanya penyebaran guru antar kecamatan
		5	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta
		6	Rendahnya kualitas manajemen pendidikan pada tiap sekolah
		7	Masih rendahnya partisipasi sekolah pada anak usia dini (PAUD).
		8	Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca
		9	Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	10	Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan
		11	Masih terbatasnya keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
		12	Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat berpendapatan rendah
		13	Pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah



Permasalahan		Akar Masalah	
		14	Cakupan Layanan asuransi /jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal
		15	Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		16	Minimnya kuantitas tenaga medis dan paramedis yang berkualitas
		17	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
		18	Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit
3	Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender	19	Masih rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak
		20	Rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak
		21	Minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan
		22	Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak
		23	Belum optimalnya peran lembaga pemerintah/swasta dalam menangani permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan	24	Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana
		25	Masih belum optimalnya pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan

2. Belum Optimalnya Pembangunan Perekonomian Daerah

Peningkatan pengembangan masyarakat yang merata keseluruhan daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Maka dari itu, pemerataan pengembangan masyarakat dalam berbagai sektor perlu



dilakukan Pemerintah Daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera. Permasalahan pokok ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

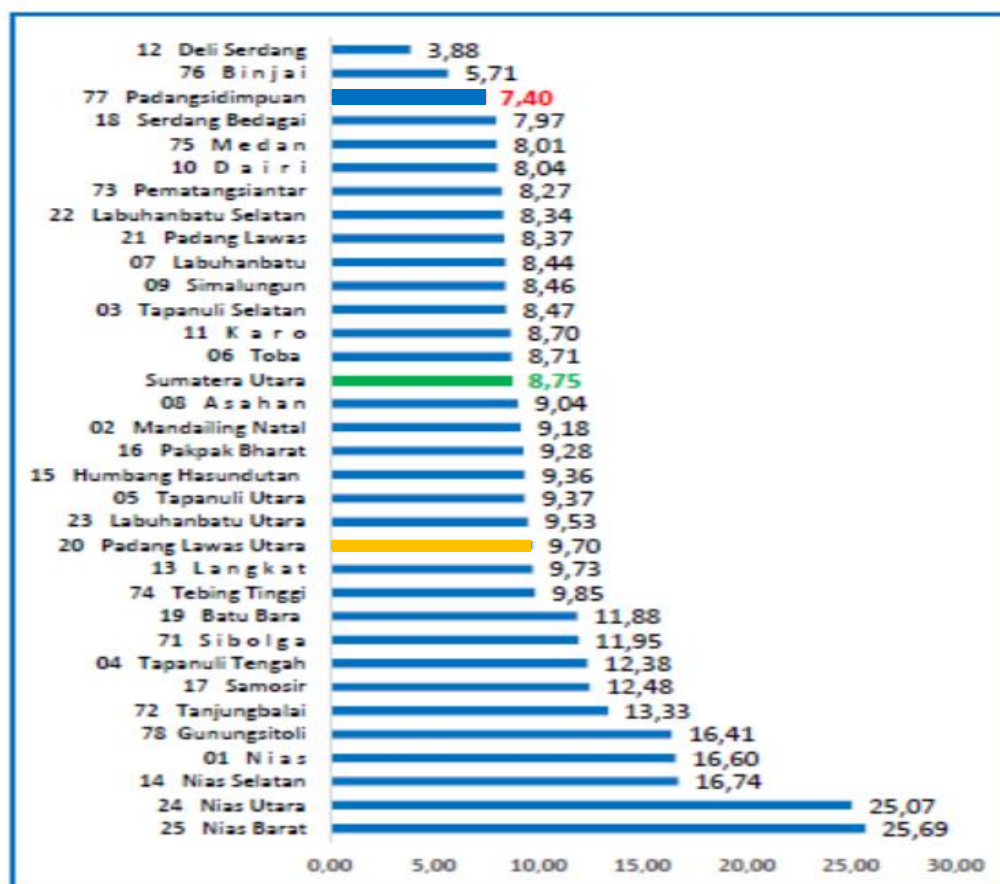
a. Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akarnya. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015, namun pada kurun waktu dua tahun terakhir angka kemiskinan Padang Lawas Utara mengalami penurunan hingga mencapai 10,70 persen pada tahun 2017. *Progress* positif ini memang menjadi rapor baik bagi Pemerintah Daerah, namun belum mengimplementasikan keberhasilan pengentasan kemiskinan daerah.

Jika dilihat dan diperbandingkan dengan level provinsi dan nasional, maka angka kemiskinan Padang Lawas Utara lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan pada kedua level tersebut. Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara mencapai 10,22 persen, sedangkan angka kemiskinan nasional mencapai 10,64 persen. Pada perbandingan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara, angka kemiskinan Padang Lawas Utara berada pada posisi 16 dengan angka kemiskinan 10,70 persen tepat di bawah angka kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki angka kemiskinan 11,02 persen.



Gambar 4.6
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017



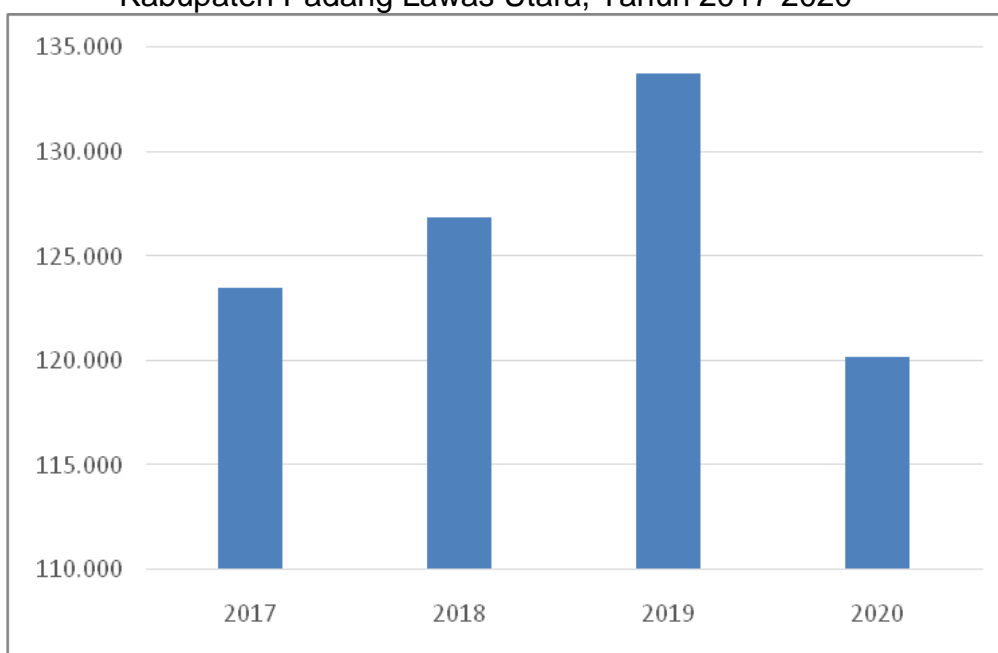
Sumber: BPS RI, 2021

b. Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja

Salah satu faktor yang cukup kuat dalam memicu kesejahteraan masyarakat adalah pekerjaan. Kualitas daya saing tenaga kerja mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang kemudian akan memberi dampak pada penghasilan masyarakat dan kesejahteraannya. Melihat hal tersebut maka kualitas daya saing tenaga kerja merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh Pemerintah bersama masyarakat agar masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.



Grafik 4.1
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2021

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Lawas Utara cukup rendah yakni mencapai 3,21 persen. Angka ini jika diperbandingkan dengan level provinsi dan Nasional akan memiliki capaian yang lebih baik. Namun jika penduduk yang bekerja dilihat berdasarkan karakteristiknya, maka akan terlihat beberapa permasalahan seperti jenis lapangan usaha. Sebanyak 64,88 persen pekerja di Kabupaten Padang Lawas Utara bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian.

c. **Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal**

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumber daya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.



Berdasarkan data yang ada, penyumbang terbesar dari PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sektor pertanian dan perkebunan. Hanya saja sektor tersebut terbatas hanya pada hasil mentah dari pertanian dan perkebunan tersebut yang berarti nilai ekonomi yang dihasilkan tidaklah optimal.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyadari bahwa dalam meningkatkan pendapatan daerah perlu adanya peningkatan dalam memajukan sektor perkebunan dan pertanian serta pengolahan hasil perkebunan dan pertanian tersebut. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan adanya keterbatasan dalam pengetahuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Selain itu kompetensi koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah serta kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan koperasi dan UMKM relatif masih rendah.

d. Belum optimalnya pemanfaatan investasi daerah

Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Nilai investasi di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 sebanyak 6.224,2 juta rupiah yang tersebar di beberapa komoditi. Pada tahun 2017, investasi ini meningkat menjadi 6.451,2 juta rupiah yang dilaksanakan oleh 593 perusahaan industri. Berdasarkan uraian di atas nilai investasi Kabupaten Padang Lawas Utara daerah cenderung meningkat, meskipun begitu berbagai permasalahan masih menyertai potensi peningkatan iklim investasi wilayah seperti birokrasi yang terlalu rumit, adanya pungutan liar, terjadi tindakan kriminalitas yang cukup tinggi, dan belum maksimalnya promosi tentang potensi daerah sebagai daya tarik investor untuk berinvestasi.



e. Belum stabilnya tingkat inflasi daerah

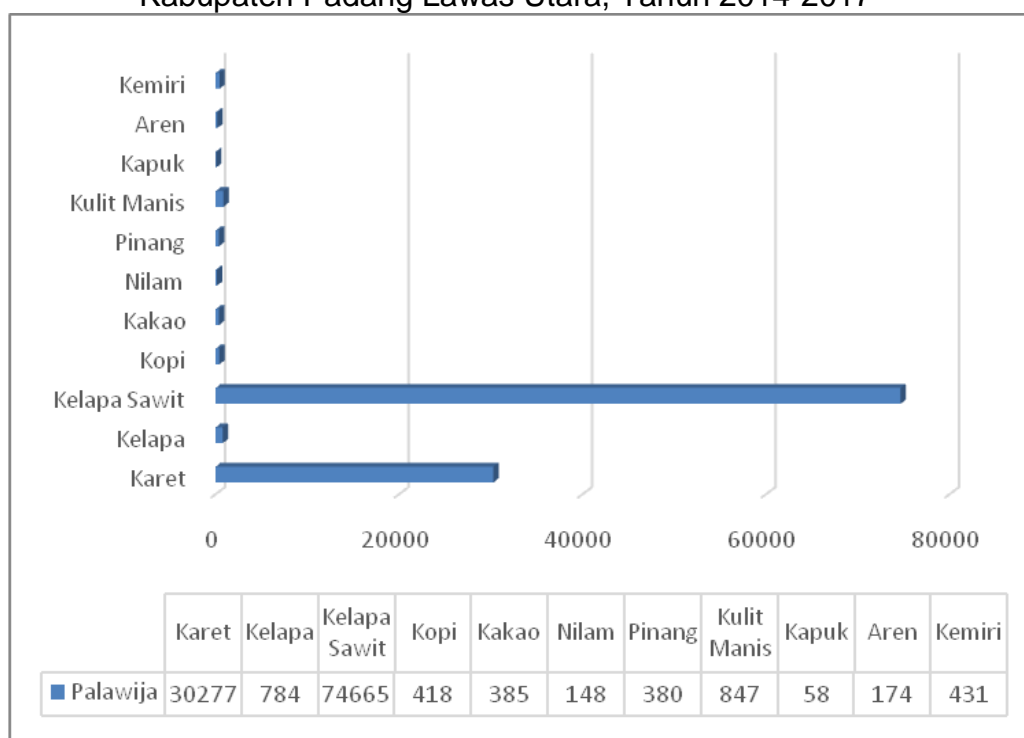
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, maka nilai inflasi Kabupaten Padang Lawas Utara sementara masih mengikuti nilai inflasi yang terjadi pada Kota Padang Lawas Utara yaitu tahun 2020 sebesar 3,5%.

f. Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki dominasi tertinggi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara. Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya dalam kontribusi perekonomian daerah. Luas panen padi sawah pada tahun 2017 mencapai 35.487,30 Ha dengan produksi sebesar 152.018,49 ton dan produktivitas sebesar 42.21 kw/Ha. Sementara itu, luas panen padi ladang pada tahun 2017 mencapai 14.896 Ha dengan produksi sebesar 34.341,20 ton dan produktivitas sebesar 30,91 kw/Ha.



Grafik 4.2
Distribusi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2018

Berdasarkan pernyataan di atas, melemahnya sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus dalam hal perbaikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian dalam arti luas adalah tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan peternak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga SDM pertanian sebagian besar



mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (setingkat SD/ sederajat). Maka dari itu, para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Mengetahui hal ini, maka Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan SDM petani dengan menggelar penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak. Program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas sehingga pengembangan produk lokal daerah dalam sektor pertanian dalam dikembangkan dengan optimal.

g. Lambatnya pergerakan aktifitas perekonomian daerah

Lambatnya pergerakan aktifitas perekonomian daerah dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini mengingat bahwa meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah yang bisa meningkat tetapi juga pendapatan masyarakat. Selain itu, lemahnya pergerakan ekonomi dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini terjadi karena pembangunan yang belum merata pada seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

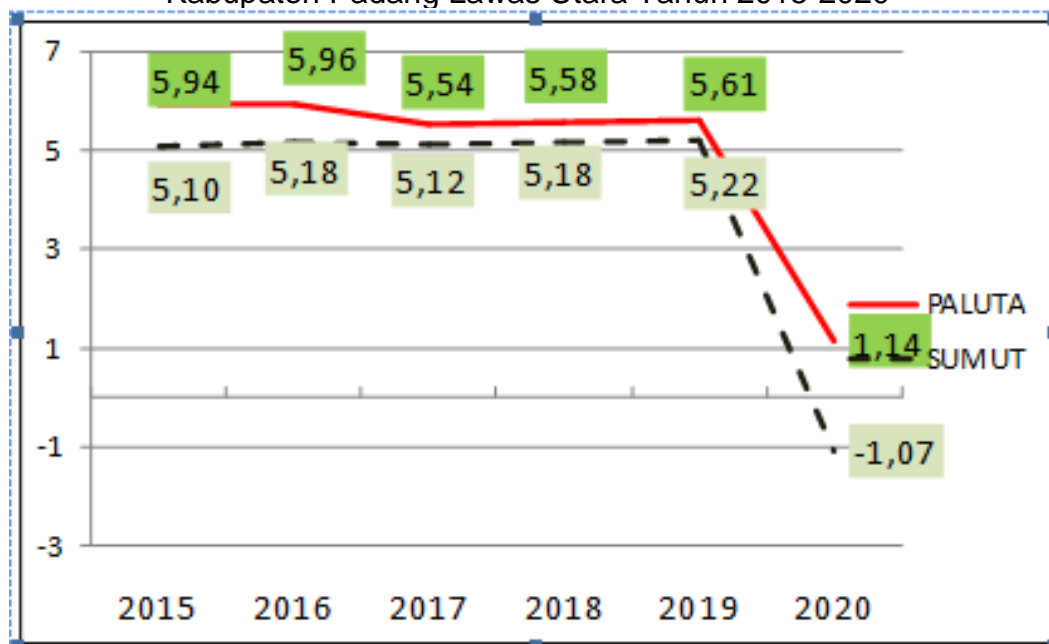
Melihat potensi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sektor pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara cukup banyak. Namun, Pemerintah Daerah belum mengembangkan sektor pariwisata sehingga objek-objek wisata di Padang Lawas Utara sebagian besar dalam keadaan tidak baik. Berdasarkan informasi dan wawasan, kondisi obyek pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan kondisi yang relatif kurang baik beberapa lokasi tersebut adalah di daerah Halongonan, Padang Bolak, Batang Onang, Sigompulon.

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara harus diperhatikan secara mendalam karena dikhawatirkan pada



suatu waktu akan menjadi pertumbuhan ekonomi negatif. Perlambatan ekonomi memang belum mengindikasikan penurunan kinerja perekonomian daerah. Perlambatan perekonomian merupakan suatu fenomena pembangunan dimana perekonomian masih tetap meningkat tetapi pertumbuhannya berada di bawah tahun sebelumnya. Terlihat pada gambar bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara mencapai 5,54 persen pada tahun 2017. Angka ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai pertumbuhan 5,96 persen.

Grafik 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2021

Dari berbagai informasi dan data diatas penjabaran permasalahan dan akar masalah dari rumusan permasalahan pokok belum meratanya pembangunan daerah adalah sebagai berikut.



Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pembangunan Daerah”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	1	Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS
		2	Relatif tingginya masyarakat penyandang masalah sosial
		3	Optimalisasi kelembagaan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat
		4	Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran
2	Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja	1	Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil
		2	Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja
		3	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
		4	Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru
		5	Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha
		6	Masih tingginya ketergantungan usia produktif
		7	Belum optimalnya kinerja lembaga ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal	1	Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		2	Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal daerah
		3	Terbatasnya kompetensi koperasi dan UMKM dalam



Permasalahan		Akar Masalah	
			memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk lokal daerah
		4	Kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM relatif rendah
4	Belum optimalnya pemanfaatan investasi daerah	1	Belum adanya regulasi yang tepat bagi PMDN/PMA
		2	Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan <i>good governance</i>
		3	Kurangnya ketersediaan sumber daya lahan dan infrastruktur yang memadai bagi calon investor
		4	Masih rendahnya daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi
		5	Masih adanya potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan sosial
		6	Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal potensi komoditi andalan.
5	Belum stabilnya tingkat inflasi daerah	1	Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar
		2	Belum adanya perencanaan yang terpadu dalam pengendalian harga di pasar
6	Lambatnya pergerakan aktifitas perekonomian daerah	1	Belum optimalnya data industri sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan
		2	Belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian
		3	Masih tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk pedesaan dan perkotaan
		4	Pengelolaan pariwisata belum dilaksanakan secara optimal



Permasalahan		Akar Masalah	
		5	Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata
		6	Aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih kurang mendukung
		7	Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah
7	Belum optimalnya Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	1	Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian terutama untuk mendukung ketahanan pangan
		2	Rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		3	Keterbatasan sarpras pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang belum optimal
		4	belum optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas
		5	Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/ sederajat), sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan penerapan teknologi
		6	Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengembangan tanaman pangan
		7	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, jalan usaha tani, pusat pemasaran produk pertanian) mengakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau untuk peruntukan lainnya
		8	Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan



Permasalahan		Akar Masalah	
		9	Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani
		10	Belum optimalnya kinerja dan pelayanan aparaturnya lingkup pertanian, khususnya penyuluh pertanian
		11	Belum adanya perencanaan yang terpadu dalam pengembangan peternakan ternak besar sebagai komoditi unggulan daerah
		12	Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan budidaya
		13	Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan

3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan aksesibilitas, maka pelaksanaan percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara sedang dalam *on progress* dikerjakan. Dalam penyempurnaan infrastruktur tersebut, Pemerintah harus lebih memerhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

a. Belum terpenuhinya layanan transportasi yang berkualitas

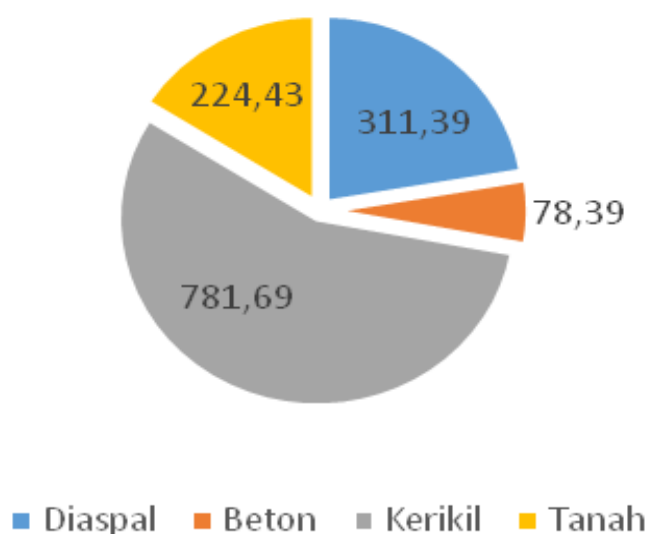
Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memudahkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan tahun 2019, panjang jalan yang ada di Kabupaten



Padang Lawas Utara adalah 1.416,59 km dimana 157,53 km sudah diaspal, sedangkan sisanya masih berupa tanah dan kerikil.

Setiap tahunnya selama lima tahun terakhir, jenis permukaan jalan beraspal di Kabupaten di Kabupaten Padang Lawas Utara selalu mengalami penurunan kuantitas. Namun di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai melakukan pembangunan jalan menggunakan perkerasan beton. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses transportasi dengan menggunakan teknik yang lebih berkembang dibanding tahun-tahun sebelumnya

Gambar 4.7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Padang Lawas Utara (km), tahun 2020



Sumber: Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2021

Selain mengelompokkan jalan melalui kondisi permukaannya, kondisi jalan juga dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak dan rusak berat. Sebanyak 12,32 persen atau sepanjang 29,46 km jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kondisi yang baik di tahun 2020. Sedangkan sebanyak 14,54 persen atau sepanjang 161 km berada pada kondisi sedang. Dan 9,21 persen atau sepanjang 66,81 km berada pada kondisi rusak dan



sisanya mengalami kerusakan berat sebesar 63,92 persen atau sepanjang 904,98 km.

b. Belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

Beberapa capaian pembangunan untuk pelayanan infrastruktur dasar seperti fasilitas kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, hingga ketertiban umum terus diupayakan untuk diwujudkan, sehingga masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menikmati setiap hasil pembangunan daerahnya. Meskipun terjadi peningkatan secara progress pembangunan, namun masih terdapat banyak permasalahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan infrastruktur dasar tersebut.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dapat menikmati fasilitas listrik dimana sebanyak 85,36 persen rumah tangga memiliki sumber penerangan utama berupa listrik PLN. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain, khususnya perkotaan yang rata-rata sudah di atas 90 persen. Hal yang perlu digarisbawahi adalah tingginya persentase rumah tangga pengguna listrik non PLN (7,93%) dimana capaian ini merupakan bagian dari program Pemerintah dalam pemeratakan fasilitas listrik hingga ke pelosok. Meskipun begitu, masih terdapat rumah tangga yang tidak menggunakan listrik dalam penerangannya yakni sebesar 6,71 persen.

Jika pemerataan listrik sudah mulai menampilkan hasil positif pembangunan daerah, sebaliknya untuk akses rumah tangga terhadap air bersih masih belum menampilkan hasil positif utamanya dalam penyediaan air layak minum. Penggunaan air layak minum di Kabupaten Padang Lawas Utara masih cukup minim dimana hanya 0,78 persen rumah tangga yang menggunakan air kemasan/isi ulang dan ledeng hanya sebanyak 0,55 persen. Masih tingginya penggunaan sumur/mata air tidak terlindung maupun lainnya (sungai, air hujan, dsb) merupakan salah satu penyebab masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.



Oleh karena itu, permasalahan ini perlu ditindaklanjuti secara terintegrasi antara Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak lain baik badan usaha milik daerah maupun swasta.

c. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pembangunan daerah

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah juga terkendala dengan belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas sampai saat ini. Penetapan Perda tentang RTRW dan RDTR yang belum terealisasi sampai saat ini meliputi kawasan strategis pertahanan dan keamanan, kawasan pertumbuhan ekonomi (bidang pariwisata dan budidaya pertanian, perikanan, serta kegiatan pendukung lainnya), kawasan sosial budaya, dan kawasan perbatasan menyebabkan terkendalanya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus *open access* juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun, disisi lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya.



Belum ditetapkannya zonasi untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan, khususnya berkaitan dengan cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum ada. Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang tambang rakyat, sumber daya air, konservasi biodiversitas secara terpadu. Disamping itu, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal. Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang di kaji dan di analisis, maka akar permasalahan dari permasalahan daerah “Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan” di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pembangunan infrastruktur dan Aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Belum terpenuhinya layanan transportasi yang berkualitas	1	Keterbatasan fasilitas pendukung ekonomi wilayah khususnya infrastruktur transportasi jalan dan jembatan dan sarana perhubungan
		2	Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit untuk dijangkau
		3	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan
		4	Kurang maksimalnya pelayanan penerbangan udara dari



Permasalahan		Akar Masalah	
			bandara yang tersedia
2	Belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	1	Masih adanya keterbatasan dalam penyediaan energi dan sumber air baku untuk industri
		2	Belum meratanya layanan air bersih
		3	Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni
		4	Banyak kondisi jalan (dan jembatan) yang rusak
		5	Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan BBM
		6	Parsitipasi pemerintah, pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi masih sangat terbatas
3	Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pembangunan daerah	1	Belum tersedianya secara lengkap regulasi tata ruang daerah hingga tingkat operasionalisasi tata ruang melalui ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang kabupaten
4	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	1	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah
		2	volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran aliran sungai
		3	Adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
		4	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
		5	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya



Permasalahan		Akar Masalah	
			pelestarian lingkungan hidup
		6	Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan
		7	Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
		8	Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
		9	Masih tingginya tingkat pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA
		10	Kurangnya kuantitas dan kualitas aparaturnya untuk menjaga hutan
		11	Perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan pertanian/perkebunan
		12	Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan
		13	Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang

4. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan



Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur Pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan menurunnya partisipasi atau peran aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur Pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat. Dari masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas layanan publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta masih rendahnya kemampuan Aparatur Sipil Negara dibidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih kurang terutama yang berhubungan kesehatan,



penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Contoh terkait layanan publik adalah jumlah KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah KTP elektronik yang diterbitkan sebanyak 135.079 unit. Pemerintah Daerah perlu perlu berkoordinasi dngan Pemerintah Pusat terkait ketersediaan blanko, sehingga proses penerbitan e-KTP berjalan lancar.

Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan *E-Government* dan penerapan penggunaan sarana dan prasarana informatika dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur Pemerintah Daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara belum berjalan secara



optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumber daya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip *good governance* belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja SDM aparatur, penyelenggaraan Pemerintah sekarang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan *skill* yang dimiliki oleh aparatur.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumberdaya manusia melalui berbagai diklat, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Disamping itu, penataan administrasi aset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih profesional.

c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Padang Lawas Utara belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan keuangan



daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara beberapa tahun ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan dalam pengelolaan aset yang masih belum optimal dan sistem penatausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Padang Lawas Utara mampu memanfaatkan segala aset daerah untuk dikelola dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka akar masalah pemicu dari permasalahan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Masih rendahnya kualitas layanan publik	1	Belum adanya standar, pedoman yang jelas dalam layanan publik
		2	Masih terbatasnya kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah
		3	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
		4	Manajemen, penataan dan pengembangan SDM aparatur yang kurang optimal
		5	Masih terbatasnya implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Kabupaten
		6	Masih rendahnya sarana dan prasarana informatika
2	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	1	Transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal



Permasalahan		Akar Masalah	
	pemerintah daerah	2	Masih belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> sebagaimana yang diharapkan
		3	Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
		4	Distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan
		5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa
		6	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
		7	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
		2	Minimnya kesadaran aparatur dalam penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien
		3	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
		4	Belum optimalnya pemahaman aparatur sipil negara terhadap peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah

5. Menurunnya Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Sektor ekonomi juga terpengaruh oleh pandemi tersebut. Pandemi Covid-19 membuat sektor ekonomi di berbagai belahan dunia mengalami kelesuan, bahkan di Kabupaten Padang Lawas Utara sekalipun. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan terjadi.



a. Menurunnya daya beli masyarakat

Penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan oleh naiknya harga barang yang membuat masyarakat tidak mampu untuk membeli barang atau jasa. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara. Pandemi menyebabkan banyaknya hambatan di berbagai sektor. Pembatasan perpindahan antar daerah menyebabkan tersebarnya penyaluran barang dan jasa. Hal ini menjadi salah satu pemicu menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan langkanya barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu, kelangkaan barang dan jasa tersebut membuat harga melambung tinggi. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk membeli. Apalagi pemerintah belum melakukan peningkatan standar batas penghasilan tak kena pajak.

b. Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kemunduran di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Pemberhentian tenaga kerja besar-besaran, melemahnya sektor industri dan ketidakmampuan pengusaha untuk mempertahankan usahanya menyebabkan banyaknya pengangguran. Hal ini berpengaruh kepada semakin banyaknya jumlah penduduk yang tidak mampu. Begitu juga di Kabupaten Padang Lawas Utara, dikarenakan dampak Covid-19 tersebut, jumlah penduduk miskin semakin meningkat dalam waktu yang cepat. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kesulitan dalam pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan dana bantuan.

c. Semakin banyaknya jumlah pengangguran

Ketidakmampuan pengusaha dalam mempertahankan usahanya menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah pengangguran. Ketersediaan lahan pekerjaan juga semakin menyempit dikarenakan keadaan krisis ekonomi. Hal ini menjadi perhatian yang serius untuk



Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari solusi dalam permasalahan pengangguran ini. Masyarakat dengan umur produktif juga banyak yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga sulit mendapatkan pekerjaan di luar daerah.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan
“Menurunnya Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Menurunnya daya beli masyarakat	1	Belum adanya peningkatan standar batas penghasilan tak kena pajak
		2	Masih terbatasnya barang dan jasa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara
		3	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan dan memajukan perdagangan
		4	Belum adanya pemberdayaan menyeluruh terhadap UKM di Padang Lawas Utara
2	Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin	5	Belum terdatanya secara menyeluruh jumlah penduduk yang memiliki pendapatan dibawah UMR
		6	Belum adanya pemberian bantuan secara menyeluruh untuk penduduk yang mengalami krisis ekonomi pasca pandemi
3	Semakin banyaknya jumlah pengangguran	7	Belum optimalnya pemberian bekal keahlian terhadap penduduk usia produktif
		8	Minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan evaluasi RPJMD periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan	<input type="checkbox"/> Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	<input type="checkbox"/> Peningkatan Pendidikan Sebagai Kota Pelajar dan Kesejahteraan Guru
2	Kesehatan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	<input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas sarana dan akses pelayanan kesehatan
			lingkungan hidup yang sehat <input type="checkbox"/> Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui program-program bidang kesehatan
		Perlunya langkah kebijakan terhadap penanganan covid	<input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas
			Penyediaan sarana prasarana penanganan covid Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Penerapan protokol kesehatan <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan <input type="checkbox"/> Peningkatan anggaran kesehatan sesuai dengan Peraturan perundangan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas antar wilayah	<input type="checkbox"/> Peningkatan jalur konektivitas antar wilayah



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
		<input type="checkbox"/> Belum maksimalnya pengembangan tata ruang perkotaan Padang Lawas Utara	<input type="checkbox"/> Pembangunan tata ruang yang terpadu dan terintegrasi
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<input type="checkbox"/> Masih terdapat beberapa RTLH dan kualitas lingkungan yang belum memiliki standar yang baik	<input type="checkbox"/> Meningkatkan perekonomian masyarakat
		<input type="checkbox"/> Tingginya kawasan permukiman baru tidak tertata dan tidak memiliki PSU	<input type="checkbox"/> Penanganan yang berkelanjutan dan tepat sasaran serta pola pikir masyarakat terhadap lingkungan sehat dan bersih.
			<input type="checkbox"/> Mensosialisasikan rencana tata ruang dan kawasan permukiman terhadap pihak swasta sebagai pengembang dan masyarakat
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<input type="checkbox"/> Masih kurangnya kewaspadaan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	<input type="checkbox"/> Peningkatan patroli siaga untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		<input type="checkbox"/> Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mematuhi Perda Dan Perkada	<input type="checkbox"/> Peningkatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada
		<input type="checkbox"/> Penanganan tematik kawasan rawan bencana	<input type="checkbox"/> Membuat Perda tentang penanggulangan bencana
		<input type="checkbox"/> Belum efektifnya pencegahan dan mitigasi bencana	<input type="checkbox"/> Memaksimalkan untuk pembentukan Forum PRB



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
			<input type="checkbox"/> Membuat peta rawan bencana dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada <input type="checkbox"/> Mensosialisasikan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan <input type="checkbox"/> Mensosialisasikan kawasan rawan bencana pada sekolah, dan instansi pemerintahan <input type="checkbox"/> Menjadikan kelurahan/desa tangguh bencana <input type="checkbox"/> Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan longsor
6	Sosial	<input type="checkbox"/> Belum Optimalnya Penanganan PMKS <input type="checkbox"/> Belum Optimalnya Sarana Sosial/Panti Asuhan / Panti Jompo / Panti Rehabilitasi	<input type="checkbox"/> Meningkatnya Penanganan dan Pembinaan terhadap PMKS <input type="checkbox"/> Memberikan dukungan pelayanan / pendampingan terhadap PMKS <input type="checkbox"/> Adanya tempat penampungan sementara bagi PMKS yang terjaring Razia <input type="checkbox"/> Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang ada di Panti Asuhan / Panti Jompo / Panti Rehabilitasi
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Kurangnya Keterampilan Pencari Kerja	<input type="checkbox"/> Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Pencari



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
			Kerja
		<input type="checkbox"/> Terbatasnya Peluang Kerja yang ada	<input type="checkbox"/> Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
		<input type="checkbox"/> Kurangnya Informasi Pasar Kerja	<input type="checkbox"/> Mendorong munculnya wira usahawan baru
		<input type="checkbox"/> Masih adanya Perusahaan yang membayar upah di bawah UMK	<input type="checkbox"/> Pembinaan Pencari Kerja Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
			<input type="checkbox"/> Mensosialisasikan Undang-undang Ketenagakerjaan kepada Pekerja dan Pengusaha
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<input type="checkbox"/> Masih rendahnya kesempatan/minat yang kurang dari kaum perempuan untuk berkecimpung di dunia politik dan tenaga Profesional (tenaga Administrasi, Teknisi dll)	<input type="checkbox"/> Koordinasi/sinergitas dengan berbagai instansi tersebut, melalui wadah Pokja PUG dan berfungsinya beberapa Gugus Tugas yang ada
		<input type="checkbox"/> Masih adanya Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan	<input type="checkbox"/> Berkolaborasi/berkoordinasi dengan instansi lain (OPD, Organisasi Profesi, Ormas, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Pers dan DPR D)
3	Pangan	<input type="checkbox"/> Terjadinya alih fungsi lahan yang tinggi akibat perkembangan kota	<input type="checkbox"/> Regulasi penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
4	Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan /atau kegiatan serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah	<input type="checkbox"/> Sudah adanya beberapa SOP pelayanan
		<input type="checkbox"/> Belum optimalnya dan meratanya pelayanan pengangkutan sampah	<input type="checkbox"/> Adanya aturan perundang - undangan terkait pengelolaan sampah
			<input type="checkbox"/> Adanya komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan sampah
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="checkbox"/> Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil terutama dalam penerbitan dokumen akta perkawinan	<input type="checkbox"/> Peningkatan capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil terutama dalam penerbitan dokumen akta perkawinan
		<input type="checkbox"/> Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam penerbitan dokumen kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)	<input type="checkbox"/> Peningkatan capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam penerbitan dokumen kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya kerjasama dan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat	<input type="checkbox"/> Peningkatan pelibatan masyarakat dalam setiap program LPM
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<input type="checkbox"/> Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan	<input type="checkbox"/> Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
		□ Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum merata	□ Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		□ Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah	□ Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata
		□ Kurangnya partisipasi, motivasi, pemahaman dan kesadaran keluarga sasaran dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	□ Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
			□ Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
8	Perhubungan	□ Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk tertib Administrasi di Bidang KIR dan Angkutan	□ Pelatihan KIR Lebih Tinggi Lagi
		□ Belum Optimal Pengawasan Untuk Angkutan di Lapangan	□ Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan
9	Komunikasi dan Informatika	□ Belum Optimalnya Jaringan Internet yang menjangkau keseluruhan Padang Lawas Utara	□ Penambahan jaringan/Peningkatan Jaringan keseluruhan wilayah Padang Lawas Utara
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	□ Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian	□ Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi K-UKM
			□ Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
11	Penanaman Modal	<input type="checkbox"/> Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<input type="checkbox"/> Memberikan Kemudahan Kepada Para Investor dengan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan.
		<input type="checkbox"/> Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<input type="checkbox"/> Optimalisasi Sistem Informasi Perizinan yang Transparan dan Mudah diakses dan digunakan Masyarakat
			<input type="checkbox"/> Kerjasama, Koordinasi dan Pola Kemitraan dengan Pihak Investor
12	Kepemudaan dan Olah Raga	<input type="checkbox"/> Kurangnya Partisipasi pemuda Dalam Organisasi dan Terbatasnya Pelayanan Kepemudaan	<input type="checkbox"/> Mengadakan pembinaan dan Kaderisasi Terhadap organisasi Kepemudaan
		<input type="checkbox"/> Kurang optimalnya Pembinaan Atlet Berprestasi	<input type="checkbox"/> Mengikut sertakan Pemuda Dalam Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
			<input type="checkbox"/> Peningkatan Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Olahraga
			<input type="checkbox"/> Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi
13	Statistik	<input type="checkbox"/> Data pembangunan belum lengkap dan <i>up to date</i>	<input type="checkbox"/> Peningkatan penelitian/kajian/survey terintegrasi
14	Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Minat baca masyarakat yang masih rendah	<input type="checkbox"/> Peningkatan Kualitas Tenaga Perpustakaan
		<input type="checkbox"/> Kurangnya Promosi Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Meningkatkan Promosi Perpustakaan



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
15	Pertanahan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya legalitas kepemilikan tanah	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pertanahan di daerah untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah.
			<input type="checkbox"/> Sosialisasi dan bantuan pemerintah terhadap kepengurusan legalitas tanah
16	Kebudayaan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya lokal daerah	<input type="checkbox"/> Pengembangan Sektor Parawisata dan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Daerah
Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya Pengelolaan Tempat Hiburan/rekreasi	<input type="checkbox"/> Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Tempat Hiburan/Rekreasi
		<input type="checkbox"/> Kurangnya Promosi dan Kerjasama Yang Baik Dari Pemerintah dan Pemilik Objek wisata	<input type="checkbox"/> Peningkatan Promosi terhadap Objek Wisata Seperti Pembuatan Brosur objek Wisata
2	Pertanian	<input type="checkbox"/> Program intensifikasi pertanian,peternakan dan perkebunan belum sesuai dengan yang diharapkan	<input type="checkbox"/> Peningkatan intensifikasi dan difersifikasi pertanian,perkebunan dan peternakan
		<input type="checkbox"/> Belum optimalnya komoditas pertanian dan peternakan	<input type="checkbox"/> Peningkatan daya saing komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
		<input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan petani	<input type="checkbox"/> Peningkatan intensifikasi dan difersifikasi pertanian,perkebunan peternakan dan perikanan



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
		<input type="checkbox"/> Teknologi dan pelatihan untuk kelompok pembudidaya ikan perlu untuk peningkatan produksi perikanan	<input type="checkbox"/> Melibatkan peran pemuda dalam sektor perikanan
3	Perdagangan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian	<input type="checkbox"/> Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
			<input type="checkbox"/> Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			<input type="checkbox"/> Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa <input type="checkbox"/> Terjalinnnya koordinasi dengan pemerintah provinsi sumatera utara, kementerian perdagangan. Kementerian perindustrian dan Koperasi UKM
4	Perindustrian	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian	<input type="checkbox"/> Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			<input type="checkbox"/> Peningkatan promosi industri kecil dan menengah
			<input type="checkbox"/> Peningkatan Pameran investasi dan promosi



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
			<input type="checkbox"/> Peningkatan fasilitas bagi IKM melalui dewan kerajinan nasional
Penunjang Urusan			
1	Perencanaan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	<input type="checkbox"/> Peningkatan konsistensi dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang terpadu
2	Keuangan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	<input type="checkbox"/> Peningkatan ketertiban pengelolaan keuangan daerah
		<input type="checkbox"/> Belum optimalnya system pengawasan pengelolaan keuangan daerah	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	<input type="checkbox"/> Kurangnya Minat Pejabat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon III lebih banyak memilih mengikuti Ujian Dinas untuk persyaratan kenaikan pangkat dari Gol.Ruang III ke Gol.Ruang IV	<input type="checkbox"/> Mengoptimalkan Implementasi PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4	Sekretariat Dewan	<input type="checkbox"/> Masih ada rancangan perda yang tidak disertai naskah akademik	<input type="checkbox"/> Penyiapan koordinasi dengan pemerintah dan DPRD
		<input type="checkbox"/> Masih terdapat komunikasi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	<input type="checkbox"/> Pelaksanaan pembinaan teknis perancangan peraturan daerah
		<input type="checkbox"/> Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat	<input type="checkbox"/> Sesuai peraturan tata tertib DPRD



NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
5	Sekretariat Daerah	<input type="checkbox"/> Kurangnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan di Bidang Pelayanan Publik	<input type="checkbox"/> Adanya Komitmen Aparatur Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
		<input type="checkbox"/> Kurang memahaminya kinerja yang masih berorientasi pada output daripada outcome	<input type="checkbox"/> Dilakukannya Pelatihan tentang AKIP

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskanantisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

5.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut



merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Selain itu, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Padang Lawas Utara adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan



(*Sustainable Development Goals/SDGs*), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, demokratisasi, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals* (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya



kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia *Post-2015* (SDGs).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu:

1. indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan;
2. Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan
3. indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*.

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia *Post-2015* berdasar pada hasil *Open Working Group* (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian



lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan,



- dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*).

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak



sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Padang Lawas Utara yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan



pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan yang besar, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat hewan dan tumbuhan yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara-negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung



maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu, ketika merumuskan isu strategis perlu memperhatikan dan memperhitungkannya, sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

e. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir hingga menjadi penyebab utama bencana alam.

Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Perlu adanya antisipasi dari Pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus memiliki strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tetap terlaksana.



Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;



5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Padang Lawas Utara.

f. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada, sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Kedepannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia



akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

Pandemi Covid-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

g. Demokratisasi

Demokratisasi saat ini sudah menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Proses demokratisasi harus diikuti oleh regulasi dan tatanan yang dapat melindungi semua orang, karena dampak demokratisasi tidak selalu baik jika tidak dilakukan dengan cara yang demokratis. Namun demikian, prosesnya harus dilakukan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang justru tidak sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilu yang “luber” di Indonesia menjadi contoh banyak negara berkembang untuk menerapkan pola dan cara Indonesia menjalankan proses demokratisasi.

Indonesia sampai saat ini terhitung sebagai negara yang sukses dalam melakukan proses demokratisasi sehingga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pencapaian itu terjadi karena prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai di level nasional, regional maupun pada tingkat lokal melalui kebijakan otonomi daerah.



h. Hak Azasi Manusia (HAM)

Secara alamiah, begitu setiap manusia terlahir di dunia, mereka telah memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Delapan belas anggota PBB kemudian membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Right*). Pada tanggal 1 Desember 1948, pada Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris terbentuklah *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 3 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.



Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain



sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, juga sebagai upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian Aparatur Pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;



5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Sumatera Utara yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya. Sedangkan di Kabupaten Padang



Lawas Utara sendiri, proyek prioritas nasional yang dilaksanakan seperti Pembangunan Desa Terpadu dengan rincian proyek Desa Digital, Penetapan Batas Desa, Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa, Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional, Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa, Pendampingan pada 74.957 desa, Daerah yang Desanya tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Usaha Ekonomi Desa yang Dikembangkan yang Terintegrasi dengan BUMDes.

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (Covid-19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran Covid-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui



gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran Covid-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang



melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak Covid-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan



ekonomi semasa Pandemi Covid-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas Utara. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

B. Pengelolaan Energi Nasional

Pengelolaan energi nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. RUEN sendiri memiliki turunan berupa Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P, yang merupakan kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

Penetapan RUEN ini merupakan pelaksanaan pasal 12 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pasal 12 ayat 2 tersebut mengamanatkan Dewan Energi Nasional bertugas : (a) merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, (b) menetapkan rencana umum energi nasional, (c) menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta (d) mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sedangkan pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.



Kebijakan Energi Nasional atau KEN itu sendiri merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Arah kebijakan energi ke depan berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Tujuannya untuk :

- (a) mewujudkan kemandirian pengelolaan energi,
- (b) menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri,
- (c) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan,
- (d) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi,
- (e) menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam negeri,
- (f) menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup

Salah satu yang menonjol adalah bagaimana di dalam RUEN disebutkan peran energi yang tidak lagi komoditas tetapi sebagai modal pembangunan seperti pada 2025. Diharapkan pada tahun tersebut bauran EBT 23 persen, penyediaan energi >400 MTOE, pembangkit listrik >115 GW, Elastisitas <1, Listrik/Kapita/Tahun 2500 kWh, Rasio Elektrifikasi ~100%. Pada tahun 2050: bauran EBT 31%, penyediaan energi >1.000 MTOE, pembangkit listrik > 430 GW, Elastisitas energi <1, Listrik/Kapita/Tahun 7000 kWh, Rasio Elektrifikasi ~100%.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi primadona kelak karena ada banyak potensi energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Energi baru adalah sumber energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, seperti hidrogen, gas metana



batubara/CBM (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*) dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sementara sumber energi terbarukan adalah sumber daya berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Sumber energi ini seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air terjun, serta gerakan dan perbedaan suhu air laut.

Di Indonesia, terdapat tiga EBT yang menonjol yakni panas bumi dengan total potensi tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Papua dimana diperkirakan memiliki sekitar 40 persen dari potensi panas bumi dunia. Selain itu, terdapat pula PLTA Hidro dan Bioenergi dengan memanfaatkan berbagai limbah dengan gasnya (biogas) hingga biodiesel yang menjadi campuran bahan bakar diesel.

5.2.3. Isu atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah (provinsi dan kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, serta RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Pada tahapan ini merupakan tahap pemantapan “tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang



tangguh” menuju pencapaian “masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik”. Pada pelaksanaan pembangunan periode ini, rumusan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah dengan rincian sebagai berikut:

Misi Pertama:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga yang terjangkau.

Misi Kedua:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi Ketiga:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.

Misi Keempat:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.



Misi Kelima:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan kelima misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka pada setiap misi yang terjabarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tabel 4.7.

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT				
Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDIA NYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA-HARGA YANG TERJANGKAU;				
MISI 3 : WUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR, BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1.1.1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata serta penguatan kapasitas	1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara



			tenaga pendidik	<p>2. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik Sekolah Menengah Kejuruan khususnya vokasi di Sumatera Utara;</p> <p>3. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu;</p> <p>4. Revitalisasi sekolah serta peningkatan sarana prasarana fasilitas belajar;</p> <p>5. Pembangunan kampung beasiswa/scholars hips booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3;</p> <p>6. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry;</p> <p>7. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;</p>
--	--	--	-----------------	---



				Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning).
		1.2 Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1.2.1 Memperkuat Peran perempuan dan kesetaraan Gender	1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.1.1 Meningkatkan penanganan pandemic covid- 19, memperkuat kualitas kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan	1. Percepatan penanganan kesehatan pandemic covid-19; 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; 3. Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara; 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Lansia; 5. Peningkatan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 7. Peningkatan ketersediaan obat dan vaksinasi.
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	3.1.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha	1. Meningkatkan Kualitas Balai Latihan Kerja 2. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan terkait (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja



				<p>3. Meningkatkan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan penyusunan Dokumen Rencana Induk</p> <p>Pembangunan Ketenagakerjaan;</p>
		3.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	3.2.1 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan	<p>1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu melalui Sistem Pertanian Terintegrasi dengan target keberhasilan Populasi Ternak Sapi terbesar sekawasan Pulau Sumatera Dan 6 Besar Nasional</p> <p>2. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah dan bawang merah</p> <p>3. Meningkatnya capaian produksi perikanan tangkap peringkat 3 terbesar se-Sumatera Utara</p>
		3.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	3.3.1 Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata	<p>1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan SDM Pengelola destinasi wisata</p>



4	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	4.1 Meningkatnya Kualitas infrastruktur	4.4.1 Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur Jalan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakarya an dan selaras dengan Penataan Ruang	<div>1. Meningkatkan pencapaian Jalan Strategis Provinsi Dalam Kondisi Baik Yang Terdiri Dari Jalan Strategis Akses Kawasan Wisata, Kawasan Pusat Produktivitas, Susur Pantai Timur, Kawasan Perkotaan, Serta Kawasan Daerah Tertinggal dan Terisolir</div> <div>2. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Regional</div> <div>3. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Air Minum</div> <div>4. Meningkatkan Pemeliharaan Infrastuktur Jaringan Irigasi</div> <div>5. Meningkatkan Penanggulangan Daya Rusak Air dan Konservasi Sumberdaya Air</div> <div>6. Meningkatkan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi</div>
MISI 2 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DENGAN ADANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA, POLITIK YANG BERETIKA, MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN MEMILIKI KOHESI SOSIAL YANG KUAT SERTA HARMONIS				
2	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang baik dan	2.1. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	2.1.1. Peningkatan kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan dan bebas diskriminasi	<div>1. Meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat wawasan kebangsaan mayarakat</div> <div>2. Meningkatkan partisipasi jumlah pemilih</div>



	Bersih			3. Meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan masyarakat
		2.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	2.2.1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan publik	1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi; 2. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Percepatan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik
MISI 4 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PERGAULAN KARENA TERBEBAS DARI JUDI, NARKOBA, PROSTITUSI DAN PENYELUNDUPAN, SEHINGGA MENJADI TELADAN DI ASIA TENGGARA DAN DUNIA				
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban	4.1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.1.1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda 2. Peningkatan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 3. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Peningkatan pengawasan keamanan dan ketertiban



MISI 5 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN KARENA EKOLOGINYA YANG TERJAGA, ALAMNYA YANG BERSIH DAN INDAH, PENDUDUKNYA YANG RAMAH, BERBUDAYA, BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERADAB

4	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	1.1. Meningkatnya kualitas air	1.1.1. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) sumber air (danau, sungai, waduk dan sumber air lainnya)	1. Pengaturan baku mutu kualitas air limbah,
				2. Penyediaan sarana dan prasarana pemnataan kualitas air
				3. Penegakkan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3
				4. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup
				5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R
				6. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik
				7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada pelaku usaha dan/atau kegiatan
		1.2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1.2.1. Meningkatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lahan dan mengurangi alih fungsi lahan	1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan
				2. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut
				3. Peningkatan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali



		1.3. Menurunnya emisi gas rumah kaca	1.3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan
--	--	---	---	---

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2019-2023, maka dirumuskan prioritas pembangunan untuk memajukan daerah dan meraih martabatnya. Prioritas pembangunan yang dirumuskan harus tepat, realistis dan visioner dengan membaca peluang dan memanfaatkan kelebihan khususnya potensi sumber daya yang dimiliki. Berikut prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara:

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;
2. Penyediaan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
4. Peningkatan daya saing sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
6. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

c. Telaahan RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara

Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.



Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagai salah satu bentuk sumber daya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Berikut diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2021-2025.

Tabel 4.8.
Program Utama Pembangunan Wilayah Berdasarkan RTRW
Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi
A.	Perwujudan Struktur Ruang	
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan	
1.1	PENGEMBANGAN PKL KOTA GUNUNG TUA	
	a. Pembangunan Kawasan Perumahan	Gunung Tua
	b. Penyusunan Study Kelayakan Terminal Terpadu	Gunungtua
	c. Penyediaan Sekolah/Perguruan Tinggi	Gunung Tua
	d. Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota	Gunung Tua
	e. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi	Kabupaen Padang Lawas Utara
	f. Studi kelayakan, DED dan pembangunan stadion.	
	g. Studi kelayakan, DED dan pengembangan pariwisata	
1.2	PENGEMBANGAN PPK Kota	



No	Program Utama	Lokasi
	Sipiongot, Kota Langkimat, Pasar Matanggor, dan Aek Godang	
	a. Penataan Ruang Terbuka	Sipiongot
1.3	PENGEMBANGAN PPL KOTA PORTIBI	
	a. Revitalisasi Kawasan Candi	Portibi
	Perwujudan Sistem Prasarana	
	a. Pengembangan Jalan Lingkar	Bukit Martajam – Parlimbata – Napahilas
	b. Pengembangan Jalan Kolektor	Ruas jalan yang menghubungkan Gunung Tua dengan ibukota kecamatan
	c. Perbaikan Jalan Poros Kecamatan	Ruas jalan yg menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-desa sekitarnya
2	d. Pembangunan Jalan Poros Desa	Ruas jalan yg menghubungkan antar desa
	e. Penataan Sempadan di Sepanjang Jalan Arteri Primer	Sepanjang jalan arteri tersebar di beberapa kecamatan
	f. Program Pengembangan Terminal: ➤ Pembangunan terminal Tipe B ➤ Pembangunan Terminal tipe C ➤ Pembangunan Sub-sub Terminal	Gunung Tua Aek godang Hutaimbaru Sipiongot Portibi Psr.Matanggor Psr.Siumbal Batugana Langkimat
	g. Program pengembangan transportasi udara ➤ Peningkatan Bandar udara Aek Godang menjadi pelabuhan skala nasional.	Aek Godang
2.2	JARINGAN AIR BERSIH	
	a. Pembangunan sarana/jaringan air bersih di kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan



No	Program Utama	Lokasi
	b. Peningkatan kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB)	Gunung Tua dan IKK Kecamatan
	c. Peningkatan cakupan pelayanan PDAM	Gunung Tua dan IKK Kecamatan
	d. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan sistem PDAM	Kabupaten Padang Lawas Utara
	e. Peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia PDAM	Kabupaten Padang Lawas Utara
2.3	JARINGAN AIR LIMBAH	
	a. Sistem septik tank individu (sistem on-site)	Seluruh Kecamatan
2.5	JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
	a. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis	Kabupaten Padang Lawas Utara
2.6	JARINGAN LISTRIK	
	a. Pembangunan Gardu Induk	Gunung Tua
	b. Perluasan Jaringan Transmisi	Kabupaten Padang Lawas Utara
2.7	JARINGAN IRIGASI	
	a. Penambahan jaringan prasarana irigasi setengah teknis di kawasan pertanian	Kabupaten Padang Lawas Utara
2.8	PENGEMBANGAN DRAINASE	
	a. Pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman	Gunung Tua, dan IKK lainnya
B	PERWUJUDAN POLA RUANG	
1	PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG	
1.2	Program perwujudan dan pengelolaan kawasan hutan lindung	
	a. Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung	Kabupaten Padang Lawas Utara



No	Program Utama	Lokasi
1.3	Program perwujudan dan mempertahankan kawasan Hutan Koservasi dan kawasan perlindungan plasma nutfah (Cagar Alam)	
	a. Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam)	Kabupaten Padang Lawas Utara
1.4	Program perwujudan sempadan sungai	
	a. Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Kabupaten Padang Lawas Utara
1.5	Program mempertahankan Kawasan Rawan Bencana	
	a. Reboisasi dan Pemeliharaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Kabupaten Padang Lawas Utara
1.6	Monitoring Pemanfaatan Kawasan Lindung	
	a. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung Kawasan Lindung	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan.	Kabupaten Padang Lawas Utara
2	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA	
2.2	Program pengembangan pertanian	
	a. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Cetak Lahan	
	c. Studi Kelayakan Pengembang Sentra Budidaya tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan	
2.3	Program Pengembangan	



No	Program Utama	Lokasi
	Pertambangan	
	a. Pembangunan industri pengolahan Pertambangan	Kabupaten Padang Lawas Utara
	b. Fasilitasi pertambangan dan galian	Kabupaten Padang Lawas Utara
C	Perwujudan Kawasan Strategis	
1	Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan	Kecamatan Halongonan

d. Telaahan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup, modal dasar pembangunan untuk lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO INDUSTRI”

Visi Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi diatas dapat dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Maju

Kemajuan pembangunan secara ekonomis dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian yang tangguh, dinamis, progresif dan merata.



Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemajuan dalam bidang ekonomi juga harus dibarengi kemajuan di bidang sosial dan budaya yang tercermin dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan.

2. Sejahtera

Mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sumber daya yang handal dan fondasi ekonomi yang kuat serta dapat memberikan kesempatan yang secara relatif seimbang pada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

3. Agroindustri

Merupakan kegiatan yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah dalam menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan dan keuntungan produsen, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Mengingat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kawasan yang pada masa lalu terkenal dengan peternakan dan juga diharapkan akan tetap menjadi kawasan peternakan unggulan di masa yang akan datang, maka agro industri yang akan dikembangkan akan terkait dengan peternakan.



Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dirumuskan upaya untuk merealisasikannya melalui misi-misi pembangunan, sebagai berikut:

1. **Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia**, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK, IMTAQ serta nilai-nilai adat budaya.
 2. **Mengembangkan ekonomi ke arah industri** yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
 3. **Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan**, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
 4. **Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien**, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
 5. **Menciptakan taat asas dan tertib hukum**, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.
- **Prioritas dan Arah Pembangunan RPJMD ke-4 (2019-2023)**

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat Padang Lawas Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJMD ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJMD ke-4, Padang Lawas Utara akan



memiliki struktur ekonomi tangguh yang didominasi oleh sektor industri dan dikelola oleh masyarakat Padang Lawas Utara.

Pada RPJM keempat dalam bidang penataan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan, pembangunan Pusat kota primer Gunung Tua akan memfokuskan pada pembangunan Sekolah/Perguruan Tinggi dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota. Sementara untuk kota pusat sekunder diprioritaskan pada penataan kawasan terbuka hijau.

Peningkatan sarana transportasi pada RPJM keempat akan terpusat pada program pengembangan jalan lingkar, jalan poros desa serta penataan sempadan sepanjang jalan arteri.

Sementara itu, pengembangan jaringan telekomunikasi yang meliputi pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis akan melengkapi pengembangan pembangunan jaringan listrik berupa perluasan jaringan transmisi. Rencana tersebut merupakan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik pada RPJM ketiga Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pembangunan sarana drainase dan irigasi, Kabupaten Padang Lawas Utara akan terfokus pada penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian, didukung oleh perluasan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, maka pada RPJM keempat Kabupaten Padang Lawas Utara program perwujudan kawasan lindung memperoleh perhatian sebagai prioritas pembangunan meliputi identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung serta pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung.

Untuk pengelolaan kawasan hutan konservasi dan kawasan perlindungan plasma nutfah (cagar alam) akan diprioritaskan pada pembangunan jalan inpeksi untuk mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam).



Demikian juga untuk perwujudan sempadan sungai dengan prioritas upaya pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian pada kawasan Sempadan Sungai.

Pada perhatiannya terhadap daerah rawan bencana pada RPJM keempat ini, Kabupaten Padang Lawas Utara akan memprioritaskan pembangunan pada upaya mempertahankan Kawasan Rawan Bencana yang terwujud dalam kegiatan reboisasi dan menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam, penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana.

Dalam prioritasnya terhadap pembangunan kawasan lindung, Kabupaten Padang Lawas Utara bertumpu pada monitoring pemanfaatan Kawasan Lindung, dimana dilakukan penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan. Sementara prioritas Pengembangan Pertambangan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan pertambangan, fasilitasi pertambangan dan galian.

Untuk perwujudan Kawasan Strategis maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-empat ini akan berkonsentrasi pada pembangunan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongon sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam perumusan pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, maka disusunlah Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten



Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 untuk sebagai salah satu acuan perumusan RPJMD periode 2019-2023.

Hasil pada penyusunan KLHS Kabupaten Padang Lawas Utara utamanya adalah Daftar Kebijakan, Rencana Dan Program (KRP) yang merupakan uraian dari hasil shortlist yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian di sesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah ditetapkan dan Isu-Isu Strategis yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Uraian dari Kebijakan, Rencana Dan Program (KRP) terkait target realisasi dan indikatif alokasi anggaran serta sumber pendanaan dan instansi pelaksana merupakan usulan untuk menyempurnakan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.9.
Usulan Kebijakan Rencana dan Program
Kepada RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023

Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satua n	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3			
TPB : <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan</i>▪ <i>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</i>										
Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Banyaknya Terjadi Masalah Sanitasi Khususnya Pada Permukiman Kawasan Perkotaan</i>▪ <i>Masih Terdapatnya Daerah-Daerah Kesulitan Air Bersih</i>▪ <i>Masih Banyak Terdapat Rumah Tidak Layak Huni</i>▪ <i>Belum Adanya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)</i>▪ <i>Longsor Pada Jalan Arteri Dan Akses Pada Daerah Pedesaan Masih Sulit</i>▪ <i>Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Perkotaan</i>▪ <i>Kurang Tertata Dan Belum Adanya Jaringan Drainase Pada Kawasan Permukiman</i>										
Program 1 : Menjadikan Kawasan Permukiman Layak Huni										
Pembangunan Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Penduduk▪ Kebutuhan Rumah	Unit	100	100	100	100	100	500.000.000.000	APBD Kabupaten, Sharing Dengan Swasta, CSR	PUPR, PERKIM, Swasta
Peningkatan Dan Pembangunan Rumah Baru Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Rumah Tidak Layak	Unit	100	100	100	100	100	400.000.000.000	APBD Kabupaten, Sharing Dengan	PUPR, PERKIM, Swasta



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
	Huni								Swasta, CSR	
Program 2 : Rehabilitasi Dan Perbaikan Serta Pembangunan Sistem Sanitasi Permukiman										
Penyusunan Rencana Pengelolaan limbah cair di kawasan perkotaan dengan cara terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Terkait Limbah Cair 	Buku	✓					200.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	<ul style="list-style-type: none"> Timbulan Tinja Jumlah Desa 	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM, DLH
Pembangunan septik tank kolektif (sistem off-site).	<ul style="list-style-type: none"> Timbulan Tinja Jumlah Desa 	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM, DLH
Pembangunan MCK Umum	<ul style="list-style-type: none"> Timbulan Tinja Jumlah Desa 	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM, DLH
Program 3 : Penyediaan Air Bersih										
Pembangunan Sarana Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan Air Jumlah Desa 	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3			
Pemanfaatan Sumber Air Tanah Dan Sungai Serta Mata Air.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan Air ▪ Jumlah Desa 	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Program 4 : Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)										
Studi DED Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Produksi Sampah	Buku	✓					300.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, DLH
Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Produksi Sampah	Unit		✓				1.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, DLH
Program 5 :Peningkatan Dan Pembangunan Jalan										
Pengembangan Dan Perbaikan Jalan Arteri	Kondisi Eksisting Jalan	Meter	✓	✓				3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR
Pembangunan Jalan Gang Dan Jalan Desa/ Kelurahan Serta Akses Jalan Menuju Sekolah	Kondisi Eksisting Jalan	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Program 6 : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
Penataan Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jenis Dan Kebutuhan RTH	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM, DLH
Pemeliharaan Ruang	Kondisi RTH	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000.000	APDB	PUPR,



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Terbuka Hijau (RTH)								0	Kabupaten	PERKIM, DLH
Program 7 : Rehabilitasi Dan Pembangunan Jaringan Drainase										
Penyusunan Masterplan dan DED Drainase.	Permasalahan Terkait Drainase	Buku	✓					300.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Perluasan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman.	Kondisi Jaringan Drainase Eksisting	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Penambahan jaringan drainase Primer/Induk dengan memanfaatkan sungai-sungai utama sebagai drainase primer.	Kondisi Sungai	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
Rehabilitasi Dan Normalisasi Drainase.	Kondisi Jaringan Drainase Eksisting	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, PERKIM
TPB : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. ▪ Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong 										



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satua n	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3			
Inovasi.										
Isu Startegis : <ul style="list-style-type: none">▪ Kurang Tertatanya Kawasan Perdagangan Pusat Kota▪ Tidak Tersedianya Wadah Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Kehutanan▪ Banyaknya Potensi Industri Mikro Yang Belum Berkembang▪ Tidak Tersedianya Terminal▪ Tidak Tersedianya Lahan Parkir▪ Kurangnya Pelayanan Akses Angkutan Umum Khususnya Pada Daerah-Daerah Yang Jauh Dari Pusat Kota										
Program 1 : Penataan Dan Pengembangan Industri Dan Perdagangan										
Penataan Kawasan Pusat Kota (CBD)	Kondisi Dan Permasalah an Saat Ini	Ha		✓				500.000.000	APDB Kabupaten	PUPR
Penyusunan RTBL Kelurahan Gunung Tua	Potensi Dan Permasalah an	Buku	✓	✓				800.000.000	APDB Kabupaten	BAPPEDA. PUPR
Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Produksi Dan Jenis Ternak	Unit		✓	✓			1.000.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Peternakan
Pembangunan Pasar Ikan	Jumlah Produksi Dan Jenis Ikan	Unit		✓	✓			1.000.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Perikanan
Pembanguan Tempat Produksi/ Pengolahan Hasil	Jumlah Dan Jenis Komoditi	Unit		✓	✓			1.000.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Pertanian



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Pertanian.										
Pembangunan Pasar Induk.	Jumlah Dan Jenis Perdagangan	Unit		✓	✓			2.000.000.000	APDB Kabupaten	DISPERIND AG
Pengembangan Industri Mikro Kreatif Dengan Di Setiap Desa	Jenis Dan Potensi Industri	Unit		✓	✓			1.000.000.000	APDB Kabupaten	DISPERIND AG
Pengembangan Sentra Industri hasil hutan dan pengolahan kayu.	Jumlah Produksi	Unit		✓	✓			1.000.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Kehutanan
Penataan Limbah Dari Industri dan perdagangan termasuk pasar.	Jenis Dan Produksi Limbah	Unit		✓	✓			200.000.000	APDB Kabupaten	DISPERIND AG
Program 2 : Pengembangan Transportasi										
Pembangunan Terminal Transit Di Kota Gunung Tua.	Jenis Kendaraan Dan Barang	Unit		✓	✓	✓		3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB
Pembangunan terminal tipe B	Jenis Kendaraan Dan Barang	Unit		✓	✓	✓		5.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Pembangunan terminal tipe C	Jenis Kendaraan Dan Barang	Unit		✓	✓	✓		3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB
Pembangunan sub-sub terminal	Jenis Kendaraan Dan Barang	Unit		✓	✓	✓		2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB
Penyediaan Lahan Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan	Kebutuhan Lahan Parkir	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat.	DISHUB
Pengembangan Trayek Angkutan Umum	Jenis Dan Rute Kendaraan	Unit		✓	✓	✓		7.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB
Pembangunan Halte	Kebutuhan Halte	Unit		✓	✓	✓		2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	DISHUB
TPB : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.										



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satua n	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3			
Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none">▪ Pengurangan Luas Hutan Dan Alih Fungsi Lahan▪ Peningkatan Ekonomi Yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam Tidak Dilakukan Dengan Bijaksana▪ Kerusakan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS)▪ Adanya Bangunan Dipinggir Bahkan Dibadan Sungai▪ Terdapatnya Daerah Rawan Bencana										
Program 1 : Pelstarian, Penataan Dan Penertiban Pada Daerah Aliran Sungai (DAS)										
Penyusunan RTRW DAS (Daerah Aliran Sungai).	Permasalah an Terkait DAS	Buku	✓					250.000.000	APDB Kabupaten	BAPPEDA
Pembuatan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi.	Batas DAS	Meter	✓	✓	✓			2.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR, DLH
Pelestaraian Sempadan.	Batas Dan Jenis Vegetasi DAS	Meter	✓	✓	✓			2.000.000.000	APDB Kabupaten	PUPR,DLH
Penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan.	Batas Dan Jenis Vegetasi DAS	Meter	✓	✓				150.000.000	APDB Kabupaten	SATPOL PP
Penataan Rumah/ Permukiman	Batas Dan Jenis	Meter	✓	✓	✓			5.000.000.000	APDB Kabupaten	BAPPEDA, PUPR



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Disepanjang Sungai Barumun.	Vegetasi DAS									
Penanganan Longsor Akibat Pertambangan Batu/ Pasir Di Sungai.	Potensi Longsor	Ha	✓	✓				5.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Pertambangan
Penegasan Batas, Pengaturan, Pengendalian Galian C	Batas Dan Jenis Pemanfaatan Sungai	Ha	✓	✓				1.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Pertambangan
Program 2 : Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)										
Pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Seluas 17.000 Ha.	Identifikasi Lahan	Ha	✓	✓				5.000.000.000	APBN	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Penyepakatan (Penggantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Hutan.	Identifikasi Lahan	Ha	✓	✓				5.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Kehutanan
Program 3 : Penegasan Batas Dan Pengembangan Kawasan Hutan										
Pembuatan batas fisik pada kawasan hutan lindung seperti	Batas Kawasan	Ha	✓					2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi,	Dinas Kehutanan



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
pembangunan pagar dan papan informasi.									Pusat	
Studi kelayakan dan pembagunan taman safari nabundong.	Batas Kawasan	Ha		✓	✓	✓		2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Kehutanan
Pembangunan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.	Batas Kawasan	Ha		✓	✓	✓		2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Kehutanan
Pengembangan Hutan Produksi.	Batas Kawasan	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	Dinas Kehutanan
Pembuatan batas fisik pada kawasan Rawan Bencana, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi.	Batas Kawasan	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, BPBD
TPB : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. ▪ Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat 										



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satua n	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3			
untuk Semua.										
Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang Tersalurkannya Potensi Khususnya Pemuda Dalam Bidang Olahraga ▪ Kurangnya Fasilitas Pendidikan Setingkat Perguruan Tinggi ▪ Kurangnya Fasilitas Kesehatan ▪ Kurangnya Fasilitas Umum 										
Program 1 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga										
Penyusunan DED dan Pembangunan GOR.	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Pembangunan Stadion Mini Sepak Bola	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Pembangunan Wisma Atlet	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Pembangunan Tribun Mini Bola Kaki	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat,	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
									Swasta	
Pembangunan Lapangan Bola Volly	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² /Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Pembangunan Kolam Renang	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² /Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Pembangunan Gedung Gym	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² /Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Olahraga, Swasta
Program 2 : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial										
Penyediaan Sekolah/Perguruan Tinggi.	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² /Ha	✓	✓				7.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta	PUPR, Dinas Pendidikan, Swasta
Penyediaan Rumah Sakit Umum	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² /Ha	✓	✓				10.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi,	PUPR, Dinas Kesehatan, Swasta



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
									Pusat, Swasta	
Pembangunan Rumah Ibadah	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, PERKIM, DINSOS
Pembangunan Asrama Pesantren	Lokasi Dan Luas Lahan	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, PERKIM, DINSOS
Pembangunan Balai Desa	Lokasi Dan Luas Lahan Serta Jumlah Desa	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, PERKIM, DINSOS
Pembangunan Rumah Jompo	Lokasi Dan Luas Lahan Serta Jumlah Orang Jompo	M ² / Ha	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, PERKIM, DINSOS
TPB : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
Isu Strategis : Masih Terdapatnya Daerah Yang Belum Terlayani energi Listrik										
Program 1 : Pembangunan Dan Peningkatan Energi Listrik										



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Pembangunan Gardu Induk.	Jumlah Kebutuhan Listrik	VA	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PLN, PUPR
Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran.	Jumlah Dan Jangkauan Energi Listrik	VA	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PLN, PUPR, PERKIM
TPB : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										
Isu Strategis : Masih Terdapatnya Daerah Rawan Pangan										
Program 1 : Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan										
Penetapan/ Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	Luas Baku Lahan Pertanian	Buku/ Peta	✓					300.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Pertanian
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering.	Jenis Komoditi	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Pertanian
Pembangunan irigasi desa non teknis.	Kondisi Ketersediaan Air	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, Dinas Pertanian
Penambahan	Jenis	Unit/	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000.000	APDB	PUPR, Dinas



Program/ Kegiatan/ Indikator	Indikator	Satuan	Tahun Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran (RP)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
jaringan prasarana irigasi setengah teknis di kawasan pertanian.	Prasarana	Meter							Kabupaten, Provinsi, Pusat	Pertanian
Pembangunan/perbaikan Embung.	Kondisi Dan Potensi Embung	Unit/ Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APDB Kabupaten, Provinsi, Pusat	PUPR, Dinas Pertanian
Pengembangan Integrasi Ternak Dengan Perkebunan.	Jenis Ternak Dan Komoditi	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Perkebunan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jenis Prasarana Dan Jenis Ternak	Unit/ Ha	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Peternakan
Pembinaan dan pengembangan lubuk larangan.	Lokasi Dan Luas Lubuk Larangan	Ha	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APDB Kabupaten	Dinas Perikanan



4.2 Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka **isu strategis Kabupaten Padang Lawas Utara** adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Tenaga kerja yang berpengetahuan, memiliki *values* dan terampil, bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

b. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu, sehingga menimbulkan arus barang. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, makin tinggi akses masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antarwilayah atau antarkota atau antardesa juga semakin tinggi. Masih berkaitan dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan



peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar berfungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Padang Lawas Utara merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain perbedaan agama, Perbedaan etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi, luas daerah. Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya terkait dengan luas wilayah Padang Lawas Utara, wilayah (Kecamatan) perlu segera dilakukan pemekaran di Kabupaten Padang Lawas Utara hal ini mempertimbangkan luas wilayah dan keefektifan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih optimal dan terjangkau. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang cukup yang besar maka akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

c. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan pada saat ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan, diharapkan cara pandang dan



cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada menghilangkan budaya negatif seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

d. Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), Pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada Pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

e. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang kaya. Terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Maka dari itu, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian, pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pariwisata ekonomi kreatif. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta perlu digalakkan untuk memberi nilai tambah pada hasil sumber daya daerah.



Peran investasi swasta vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam pemanfaatan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki faktor produksi yang besar. Namun yang perlu digarisbawahi, dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya, namun juga melihat keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara menekankan kepada pemulihan ekonomi melalui penerapan wisata aman Covid-19 dengan Clean Healthy Safe dan Environmentally (CHSE), pengembangan desa wisata tematik dan pengembangan ekonomi kreatif.

f. Penanganan dan Pemulihan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-Cov-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19. Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.